

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARVICK HASNUL QOLBI
2. Jabatan : WAKIL MENTERI
3. NHK : 796057

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **8.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **2.553.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ S 350L Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ SL 320 AT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ C 250 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. MOBIL, MERCEDES BENZ S500 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.426.804.909
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.929.804.909
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.929.804.909

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.